BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Pengelolaan adalah istilah yang berasal dari kata "*management*," yang memiliki akar kata "*to manage*," yang artinya mengatur. Proses pengelolaan dilakukan melalui serangkaian langkah yang diorganisir berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Dengan kata lain, manajemen atau pengelolaan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan aspek-aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian¹.

Menurut Terry pengelolaan merupakan serangkaian langkah khusus yang melibatkan perencanaan, organisasi, penggerakan, dan pengendalian, yang digunakan untuk merencanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya². Jadi pengelolaan adalah proses perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi dan efektivitas.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya mengacu pada cara mencari sumber dana, mengalokasikan dana sesuai dengan rencana biaya, meningkatkan modal kerja, dan merencanakan kebutuhan di masa depan.

¹ Pascallino Julian Suawa, Novie R. Pioh, dan Welly Waworundeng, "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721>. Halaman 3

² George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, n.d.).

Biaya pendidikan mencakup segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk hal-hal yang tidak bersifat moneter.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan mirip dengan manajemen pembiayaan yang mempunyai tiga fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah menurut Hasbullah meliputi tiga hal, yaitu: 1) *financing*, menyangkut dari mana sumber pembiayaan diperoleh, 2) *budgeting*, bagaimana dana pendidikan dialokasikan, dan 3) *accountability*, bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan³.

Menurut Jones Pengelolaan pembiayaan dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang mencakup tiga tahap utama. Pertama, tahap perencanaan, yang mencakup koordinasi semua sumber daya yang tersedia dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara sistematis dan tanpa dampak negatif yang merugikan⁴. Kedua, tahap pelaksanaan, yang melibatkan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ketiga, tahap evaluasi, yang merupakan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya finansial yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif dalam mendukung pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas.

³ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan : Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Halaman 122

⁴ Haikal Adriansyah dan Maftuhah Maftuhah, "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Poris Pelawad 5 Kota Tangerang," *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2023): 1–24.

2. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Zaidi dalam buku Manahan Tampubolon menyatakan bahwa perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai tujuan di masa depan dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara efisien dalam periode waktu tertentu⁵. Piet sahetian merumuskan bahwa *planning* atau perencanaan adalah langkah persiapan yang berfungsi sebagai landasan bagi tindakan selanjutnya. Perencanaan yang efektif adalah perencanaan yang memungkinkan dilaksanakannya dengan kemungkinan yang tinggi. Dengan merencanakan, kita dapat merinci tujuan yang hendak dicapai, cakupan pekerjaan yang akan dilakukan, pihak-pihak yang terlibat, sumber daya yang diperlukan, serta langkah-langkah dan metode kerja yang dipilih berdasarkan tingkat urgensi dan prioritas⁶.

Proses perencanaan anggaran, atau *budgeting*, adalah proses yang mencakup identifikasi tujuan, menetapkan prioritas, menguraikan tujuan ke dalam indikator kinerja yang dapat diukur, mengevaluasi alternatif pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, dan memberikan rekomendasi mengenai pendekatan alternatif untuk mencapai sasaran. Dalam konteks pendidikan, penyusunan anggaran merupakan perencanaan operasional yang diungkapkan dalam bentuk angka atau nilai

⁵ Manahan Tampubolon, *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan : Education and Finance Plan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). Halaman 5

⁶ Dedi Wandra dan Hadiyanto Hadiyanto, "Perencanaan Pembiayaan Pendidikan," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 5 (2021): 2900.

uang dan berfungsi sebagai panduan untuk pengelolaan dana dalam periode waktu tertentu⁷.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan anggaran menurut Nanang Fattah dapat dirangkum sebagai berikut: *Pertama*, pentingnya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam kerangka manajemen dan struktur organisasi. *Kedua*, keberadaan sistem akuntansi yang memadai dalam pelaksanaan anggaran atau pembiayaan. *Ketiga*, perlunya melakukan penelitian dan analisis untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Keempat, dukungan yang diperlukan dari semua tingkatan pelaksanaan, mulai dari pimpinan tertinggi hingga tingkat paling dasar.

Menurut Fattah prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.
2. Mengidentifikasi sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang.
3. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan untuk pernyataan finansial.
4. memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
5. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
6. Melakukan revisi usulan anggaran.

⁷ Arwildayanto, Lamatenggo, dan Sumar, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*.

7. Persetujuan revisi usulan anggaran.

8. Pengesahan anggaran⁸

Dalam membuat suatu perencanaan tentunya tidak akan menutup kemungkinan akan menghadapi berbagai hambatan. Hambatan- hambatan sebagai berikut:

- Kesulitan dalam meramalkan.
- Kesulitan dalam pembiayaan.
- Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi.
- Kurang jelasnya tujuan

Jika dalam sebuah perencanaan suatu program atau kegiatan muncul kendala atau hambatan maka haruslah segera temukan solusi dengan cara melakukan musyawarah bersama untuk mencari alternatif penyelesaian atau jalan keluar yang optimal.

Dalam mengelola pembiayaan di suatu lembaga pendidikan, langkah yang harus diambil adalah menyusun perencanaan pembiayaan yang dikenal sebagai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau dalam lingkup madrasah lebih dikenal sebagai Rencana Kegiatan Dan Anggaran Madrasah (RKAM). Kepala madrasah bersama seluruh pihak yang terkait bekerja sama untuk merinci RKAM. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa pendapatan dan pengeluaran yang akan dijalankan selama satu tahun dapat diatur secara efektif. Dengan demikian,

⁸ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).

kegiatan yang direncanakan dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada di lembaga pendidikan tersebut.

Rencana Kegiatan Dan Anggaran Madrasah (RKAM) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan suatu bagian dari rencana operasional tahunan. RKAM meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi pembangunan sekolah, pemeliharaan buku, meja dan kursi. Penyusunan RKAM tersebut harus melibatkan kepala madrasah, pendidik, komite sekolah, staf TU, dan komunitas sekolah. RKAM perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran dapat memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal⁹.

Langkah-langkah penyusunan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan
- 2) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya
- 3) Menentukan program kerja dan rincian program
- 4) Menghitung dana yang dibutuhkan
- 5) Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana

Prosedur penyusunan pembiayaan pendidikan memerlukan tahapan yang sistematis sebagai berikut¹⁰:

- a) Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.

⁹ Nurochim, *Administrasi Pendidikan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 262.

¹⁰ Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 231.

- b) Mengidentifikasi sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
- c) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
- d) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
- e) Melakukan revisi usulan anggaran, meliputi :

1) Persetujuan revisi usulan anggaran 2) Pengesahan anggaran.

Dari uraian diatas dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan/ Rencana Kegiatan Dan Anggaran Madrasah (RKAM) yaitu proses pengumpulan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang telah ditentukan terkait dengan pendapatan biaya dan pengeluaran yang akan dilakukan.

Tahap perencanaan pembiayaan pendidikan melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti. Proses ini umumnya terdiri dari enam langkah utama. Pertama, langkah ini mencakup penentuan rencana anggaran kegiatan untuk suatu periode tertentu. Kedua, identifikasi sumber dana yang akan digunakan dalam pelaksanaan anggaran. Ketiga, merumuskan rencana anggaran ke dalam format yang biasanya disusun dalam bentuk lembar kerja, seperti excel. Keempat, melakukan revisi pada usulan anggaran jika ada ketidaksesuaian. Kelima, menyetujui revisi usulan anggaran jika diperlukan. Terakhir, langkah keenam adalah mengesahkan anggaran, yang merupakan hasil akhir dari seluruh proses perencanaan pembiayaan.

3. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh didalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif, dan efisien¹¹.

Setelah menyelesaikan perencanaan pembiayaan pendidikan dan mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, serta menghasilkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM), langkah berikutnya dalam pengelolaan adalah pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan melibatkan dua kegiatan utama, yaitu penerimaan dan pengeluaran dana. Baik penerimaan maupun pengeluaran dana dari berbagai sumber perlu dicatat sesuai dengan prosedur pengelolaan yang telah disepakati, baik itu berdasarkan konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.

Kemudian pelaksanaan pembiayaan dilakukan meliputi dua hal yaitu pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yaitu penerimaan, menyimpan dan mengeluarkan uang. E.Mulyasa berpendapat bahwa pelaksanaan pengelolaan pembiayaan

¹¹ Sri Minarti, *Manajemen sekolah : Mengelola Lembaga Pendidikan secara Mandiri* (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2019), 239.

pendidikan dalam garis besarnya dikelompokkan dua kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran¹².

Pengelolaan pembiayaan di sekolah dibebankan kepada kepala madrasah. Karena memang kepala madrasah berperan sebagai pemberi wewenang sekaligus penanggungjawab penuh terhadap anggaran yang telah diterima ataupun yang telah dikeluarkan¹³. Untuk operasional, manajemen pembiayaan di sekolah biasa dikelola oleh bendaharawan yang melakukan pembukuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prosedur mengenai penerimaan dan pengeluaran ialah sebagai berikut :

1. Penerimaan

Penerimaan terhadap biaya pendidikan ditentukan oleh besarnya biaya yang diterima oleh sekolah atau madrasah dari setiap sumber pendanaan. Sedangkan penerimaan pembiayaan pendidikan sumber-sumber dana meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran penunjang pendidikan, dana masyarakat, donatur dan lain-lain¹⁴.

Pembukuan terhadap penerimaan atau pendapatan biaya pendidikan pada umumnya didasarkan pada prosedur pembukuan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Penanggung jawab terhadap segala penerimaan/pendapatan biaya pendidikan dan juga pembukuannya

¹² E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, 13 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 201.

¹³ Arwildayanto, Lamatenggo, dan Sumar, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*.

¹⁴ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, 239–240.

dipegang sepenuhnya oleh bendahara lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan diketahui oleh kepala madrasah.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penerimaan ini dari pihak sekolah harus siap membukukan apa saja yang menjadi masukan agar tidak adanya penyimpangan dari apa yang menjadi petunjuk penggunaan dan pengeluarannya, dan kepala madrasah harus selalu memeriksa pembukuan sekolah sesuai dengan RKAM.

2. Pengeluaran

Kegiatan pengeluaran biaya pendidikan tentunya tidak menyimpang dari Rencana Kegiatan Dan Anggaran Madrasah (RKAM). Pengeluaran biaya pendidikan dipergunakan secara efektif dan efisien, artinya setiap penerimaan/ pendapatan dana, untuk pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan- kebutuhan yang telah direncanakan.

Pengeluaran biaya pendidikan biasanya berupa biaya langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini sekolah dalam penyusunan anggaran belanja sekolah dilaksanakan oleh kepala madrasah dibantu dengan para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah-serta komite sekolah dibawah pengawasan pemerintah¹⁵.

4. Evaluasi Pembiayaan Pendidikan

Menurut Suharsimi, “Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya

¹⁵ M Yunus Anwar, “Manajemen Keuangan dan Pembiayaan di Madrasah,” *Jurnal Ilmiah Islamic Resources* 19, no. 1 (2022): 2–12, <http://103.133.36.84/index.php/islamicresources>.

informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan”¹⁶.

Evaluasi didefinisikan oleh Nanang Fattah dalam buku landasan manajemen pendidikan yaitu sebagai proses pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Nanang Fattah secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu memantau (monitoring), menilai dan melaporkan. Proses evaluasi ini dilakukan untuk dan agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan manajemen keuangan berjalan secara efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya. Nanang Fattah juga mengemukakan bahwa diantara tujuan evaluasi adalah untuk :

- 1) Memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus.
- 2) Menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi kepada penggunaan sumber daya pendidikan (manusia atau tenaga, sarana atau prasana, biaya) secara efisien dan ekonomis.
- 3) Memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek tertentu seperti program tahunan, kemajuan belajar.

Evaluasi sering dilihat sebagai sebuah upaya pencegahan. Ia bertujuan untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salah, serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan

¹⁶ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis bagi Praktisi Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 2.

datang. Pencegahan dari kesalahan agar tidak terulang kembali merupakan fungsi evaluasi yang valid, namun ia memiliki kekurangan yang mendasar.

Setiap pelaksanaan evaluasi pembiayaan faktor-faktor yang harus dimasukkan dalam setiap kegiatan evaluasi dengan struktur yang terorganisasi agar menghilangkan salah faham mengenai keuangan sekolah, adanya supervisi untuk mengecek agar tidak adanya kesalahan yang terjadi dalam kegiatan sekolah mengenai anggaran, dan harus selalu memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah.

Evaluasi dapat disebut pula merupakan elemen kunci dalam perencanaan. Jika sebuah sekolah mau belajar dari pengalaman dan tidak statis, maka proses evaluasi dan umpan balik harus menjadi elemen yang esensial dalam budayanya. Proses evaluasi harus fokus pada pelanggan, dan mengeksplorasi dua isu; pertama, tingkatan dimana sekolah mampu memenuhi kebutuhan individual para pelanggannya, baik internal maupun eksternal, dan kedua, sejauh mana sekolah mampu mencapai misi dan tujuan strategisnya.

Untuk memastikan bahwa sebuah proses evaluasi mampu mengawasi tujuan individual dan sekolah tersebut, maka evaluasi tersebut harus dilakukan dalam tiga level evaluasi, diantaranya :

- 1) Segera atau harian, yaitu melibatkan pemeriksaan harian. Tipe evaluasi ini biasanya berlangsung secara informal dan dilakukan oleh individu guru atau pada tingkat tim.

- 2) Jangka pendek, yaitu membutuhkan cara yang lebih terstruktur dan lebih spesifik, yang menjamin bahwa pelajar sudah berada dalam jalur yang seharusnya sedang meraih potensinya. Tujuannya evaluasi pada tingkatan ini adalah untuk memastikan perbaikan bagi segala sesuatu yang harus diperbaiki. Evaluasi jangka pendek dapat digunakan sebagai sebuah metode control mutu yang menyoroiti kesalahan dan masalah.
- 3) Jangka panjang, yaitu sebuah evaluasi terhadap kemajuan dalam mencapai tujuan strategis. Evaluasi ini merupakan evaluasi yang dipimpin langsung oleh institusi secara keseluruhan. Tipe evaluasi ini dilakukan sebagai sebuah usaha pembuka dalam memperbaharui rencana strategis. Tujuan terpenting dari evaluasi ini adalah pencegahan¹⁷.

Evaluasi sering dilihat sebagai sebuah upaya pencegahan. Ia bertujuan untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salah, serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pencegahan dari kesalahan agar tidak terulang kembali merupakan fungsi evaluasi yang valid, namun ia memiliki kekurangan yang mendasar.

Tujuan evaluasi pembiayaan pendidikan ialah untuk mengetahui berapa besar dana yang telah dihabiskan dalam anggaran tersebut serta untuk mengetahui apakah program pendidikan yang telah direncanakan dan yang telah diselenggarakan telah sesuai dengan harapan, dan dengan

¹⁷ Sallis Edward, *Total Quality Management in Education* (Manajemen Mutu Pendidikan), (Jogjakarta; IRCISoD, 2006), Hal;236-237

evaluasi tersebut semua pembiayaan yang disalurkan di dunia pendidikan akan berjalan dengan semestinya.

5. Prinsip dalam Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Prinsip dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan sudah tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 48 yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan harus selalu didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selain itu, penting juga untuk menekankan prinsip efektivitas dalam pengelolaan dana tersebut¹⁸.

Hadari Nawawi berpendapat bahwa dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, sangat penting untuk mematuhi beberapa prinsip yang harus diinternalisasi sebagai sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas. Beberapa prinsip tersebut termasuk:

- 1) Menjaga pengeluaran agar hemat, tidak berlebihan, dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
- 2) Memastikan pengeluaran diarahkan dan terkendali sesuai dengan rencana, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- 3) Memberikan prioritas pada penggunaan produk-produk dalam negeri.

Kemudian Nanang Fattah juga mengemukakan beberapa prinsip dalam pengelolaan keuangan pendidikan, antara lain: 1) adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi pendidikan, 2) adanya akuntansi yang memadai dalam

¹⁸ Nur Rahmah, "Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah," *Kelola: Journal of Islamic Education Management* 1, no. 1 (2016): 73–77.

melaksanakan anggaran pendidikan, 3) adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi pendidikan, 4) adanya dukungan dari pelaksana dari tingkat atas hingga yang paling bawah¹⁹.

6. Jenis-Jenis Biaya Pendidikan

Cohn dan Geske telah mengelompokan biaya pendidikan kedalam dua jenis yakni biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung tersebut meliputi biaya yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, dan keluarga siswa. Sedangkan biaya tidak langsung contohnya seperti *forgone earning*²⁰.

Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro menurut Anwar, Gaffar dan Thomas, beberapa kategori biaya pendidikan ialah yang pertama, biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Kedua, biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*). Ketiga, biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-monetary costs*)²¹.

- a) biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*)
- b) biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*)
- c) biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-monetary costs*)

¹⁹ Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, ed. Nita Nur Muliawati, 1 ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).

²⁰ Prof. Dr. Akdon M. Pd, Dr. Dedy Achmad Kurniady M. Pd, dan Dr. Deni Darmawan S. Pd M. Si, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, ed. Pipih Latifah, 2 ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017). Halaman 14

²¹ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, 5 ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010). Halaman 4

Menurut Permendikbud nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Biaya Investasi; dan b. Biaya Operasional.

7. Sumber Pembiayaan Pendidikan

Menurut Permendikbud nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan dapat bersumber dari: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²².

Pembiayaan untuk sekolah, berasal dari dana pemerintah, yang biasanya berasal dari gaji dan biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas (OPF), serta dana dari masyarakat, termasuk sumbangan dari orang tua siswa dan dari masyarakat luas dan dunia usaha. Perlu diingat bahwa pendanaan itu berkaitan tentang kepercayaan. Kemudian jika sekolah atau lembaga pendidikan ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat maka program yang dibuat lembaga pendidikan haruslah menarik dan bagus serta mampu bermanfaat²³.

²² “Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah,” *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18* (Jakarta, 2023).

²³ Prof. Dr. Akdon M. Pd, Dr. Dedy Achmad Kurniady M. Pd, dan Dr. Deni Darmawan S. Pd M. Si, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*.

Sumber dana menurut Nanang Fattah berasal atau bersumber dari orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha, dan bisa juga dari alumni. Sedangkan pendapat lain menurut Uhar Suharsaputra secara umum, dana untuk sekolah biasanya berasal dari dua sumber utama, yaitu dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menyediakan alokasi dana rutin dan biaya operasional, terutama untuk sekolah negeri. Disisi lain, dana dari masyarakat bisa diperoleh dari kontribusi orang tua siswa atau kelompok masyarakat lainnya²⁴.

Menurut Dedi Kurniadi, sumber-sumber pendanaan pendidikan dari sudut pandang tingkat makro (nasional) termasuk:

- a. Pemasukan negara dari berbagai jenis pajak.
- b. Pendapatan dari sektor non-pajak, seperti eksploitasi sumber daya alam dan produksi nasional, yang sering dikelompokkan menjadi sektor "gas" dan "non-migas."
- c. Pendapatan dari ekspor barang dan jasa.
- d. Usaha dari negara seperti BUMN termasuk investasi saham.
- e. Bantuan dalam bentuk hibah dan pinjaman luar negeri, baik dari lembaga-lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia, ADB, IMF, IDB, JICA) maupun pemerintah asing melalui kerja sama multilateral maupun bilateral²⁵.

Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan secara garis besar bersumber dari: 1) Pemerintah,

²⁴ Uhar Suharsaputra dan Nurul Falah, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

²⁵ Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Halaman 2

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang keduanya bersifat umum atau khusus untuk tujuan pendidikan, 2) Orang tua dan peserta didik, 3) Masyarakat

B. Kemandirian Madrasah

1. Pengertian Kemandirian Madrasah

Kemandirian sekolah merupakan salah satu prinsip utama dalam manajemen berbasis sekolah (MBS), yaitu model pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Mulyasa²⁶, kemandirian sekolah adalah kemampuan sekolah untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pembiayaan pendidikan, dengan melibatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat secara aktif. Kemandirian sekolah adalah kemampuan suatu satuan pendidikan untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri guna mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Sekolah yang mandiri memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan, tanpa terlalu bergantung pihak luar.

2. Tujuan Kemandirian Madrasah

Tujuan kemandirian sekolah adalah untuk memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam mengelola dan mengoptimalkan seluruh sumber daya

²⁶ Prof. Dr. H. E. Mulyasa. M.Pd, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

yang dimilikinya guna meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dalam konteks manajemen berbasis sekolah (MBS), kemandirian bertujuan untuk memperkuat peran serta sekolah sebagai lembaga yang mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan lokal²⁷. Secara lebih spesifik, tujuan kemandirian sekolah antara lain²⁸:

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah, terutama dalam hal pembiayaan, sarana prasarana, dan tenaga kependidikan.
- b) Memberdayakan sekolah agar mampu menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan sendiri berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki.
- c) Mendorong partisipasi aktif warga sekolah dan masyarakat, termasuk komite sekolah, orang tua, dan mitra eksternal dalam pengembangan sekolah.
- d) Mengembangkan inovasi dan kreativitas sekolah, terutama dalam mencari solusi atas berbagai keterbatasan dan tantangan, termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan.
- e) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sekolah dalam rangka menciptakan sistem pendidikan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

²⁷ Lestaringtyas Lestaringtyas, "Manajemen Berbasis Sekolah Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Komite Serta Tantangan Pelaksanaannya," *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah* 5, no. 1 (2024): 077–086.

²⁸ Zulfadli, "Pelaksanaan MBS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal Studi Penelitian, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2014): 15.

3. Kemandirian Madrasah dalam Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Kemandirian sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan kemampuan sekolah untuk merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan keuangan secara mandiri, partisipatif, dan transparan demi mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Dalam paradigma *Manajemen Berbasis Sekolah* (MBS), sekolah diberi kewenangan luas untuk mengatur sendiri proses pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan²⁹.

Menurut Fattah sekolah yang mandiri harus mampu menggali potensi sumber dana secara internal maupun eksternal. Sumber dana internal dapat berasal dari kontribusi peserta didik atau komite sekolah, sedangkan sumber eksternal bisa berupa bantuan dari pemerintah (seperti BOS), hibah, donatur, kerja sama dengan dunia usaha, maupun bentuk kemitraan lainnya. Kemampuan sekolah untuk menjalin kemitraan dan mengelola sumber daya keuangan secara kreatif menjadi indikator penting dari tingkat kemandirian³⁰.

Mulyasa berpendapat bahwa lembaga pendidikan, termasuk madrasah, idealnya tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah, tetapi mampu mengelola dan mengembangkan sumber pembiayaan sendiri. Prinsip-prinsip utama:

- a) Otonomi kelembagaan: Madrasah memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi keuangan secara mandiri.

²⁹ Zulfadli, "Pelaksanaan MBS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan."

³⁰ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*.

- b) Kreativitas dan inovasi: Madrasah mampu mencari sumber pendanaan alternatif di luar BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
- c) Akuntabilitas dan transparansi: Pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab³¹.

³¹ Prof. Dr. H. E. Mulyasa. M.Pd, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung.